

pembuatan perjanjian kawin selama perkawinan ini mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat mengenai hal tersebut

Perlunya sosialisasi mengenai perjanjian kawin yang dapat dibuat selama perkawinan, baik mengenai status kedudukan harta yang telah terbentuk sebelumnya maupun mengenai pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga terkait perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bhakti,  
1990

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta : UII Pres,  
2000

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar  
Grafika, 1991

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja  
Grafindo Persada, 1998

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta : PT  
Bumi Aksara, 2002

Devita, Irma. *Hukum Waris*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2014

Djamil Latief, Hukum Perkawinan, Jakarta : Gahlia Indonesia, 1982

Endang Sumiarni, Kedudukan Suami-istri Dalam Hukum Perkawinan  
(Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin), Yogyakarta :  
Wonderful Publishing Company, 2004

H.B. Sutopo. Metodologi Penelitian Hukum Kualitaif Bagian II, Surakarta :  
UNS Press. 1998

Hemoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proposonalitas dalam  
Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. 2010

- HM, Hans dan Ter Har editor W.D Kolkman. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. (Bali: Pustaka. 2010
- Hilaman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundang Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2003
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993
- Ko Tyay sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Semarang : Seksi Perdata Barat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981
- Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasan*, Bandung : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat Cetakan Kedua, 1990
- M. Idris Ramulyo, SH., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Ind-Hill-Co, 1990
- Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang : Fakultas Hukum Diponegoro, 2008
- Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : PT. Indonesia Legal Center Publishing, 2004

Metrokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta:

Liberty. 2003

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit

Universitas Diponegoro, Cetakan Pertama, 2008

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermesa, 1994

Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Cetakan Keempat, Jakarta : PT.

Intermesa, 1994

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermesa, 1994

Setiono, H. *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-undang Hukum*

*Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Surakarta: UPT Penerbitan dan

Percetakan UNS (UNS Press). 2012

Soemaini, A Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika

Aditama. 2001

Sri Sudaryatmi, *Hukum Kekerabatan Di Indonesia*, Semarang : Pustaka

Magister Semarang, 2009

Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi praktek Notaris*, Buku I, Cetakan

Kedua, Jakarta : Ichtiar Baru an Hoeve, 2000

Yunanto, *Perjanjian Pra Nikah dan Harta Kekayaan Perkawinan*,

(Semarang: CV Madina, 2013

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgelijk Wetboek*.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Undang-Undang  
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

#### C. Jurnal

Kevin Burke, 2009, *Rule of Law Symposium Understanding the International Rule of Law as a Commitment to Procedural Minnesota*, Journal Of Int'l Law, Vol 18:2.

Susisusanti Pakaya, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dengan Akta Perjanjian Kawin*, Vol 4:2

#### D. Website

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

diakses pada 30 januari

### DAFTAR LAMPIRAN

- A. Lampiran 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- B. Lampiran 2 **Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL**

**tanggal 19 Mei 2017.**

C. Lampiran 3 Putusan Pengadilan Negri Jakarta Timur  
207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR